

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peran IRE dalam pembangunan politik di desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terkait peran IRE Yogyakarta dalam pembangunan politik di desa Wukirsari yang terdapat dalam program-program IRE Yogyakarta antara lain, program Pengembangan Wacana Demiliterisasi di Tingkat Lokal, program Pengembangan *Good Governance* Dalam Konteks Otonomi Desa, kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa, kegiatan "*Revitalising Craftwomen of Batik Cottage Industry in Bantul*".

Dari pelaksanaan pembangunan politik terkait dengan penguatan, atau pendalaman demokrasi yang pernah dilaksanakan di desa Wukirsari, Bantul, Yogyakarta apabila dilihat dalam kegiatannya merupakan LSM dalam katagori mobilisasi di mana LSM ini memberikan ruang bagi masyarakat secara demokratis guna untuk melakukan pendidikan politik kepada warga namun hanya sekedar memobilisasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan IRE Yogyakarta walaupun masyarakat sendiri kurang sadar akan alasan kenapa warga dimobilisasi.

Dalam hal ini tampaknya sekedar untuk memberikan ruang diskusi-diskusi terkait isu-isu yang diangkat oleh IRE untuk dibicarakan bersama-sama kepada pemerintah desa maupun warga desa dari situlah bahwa diketahui LSM ini

memandang masyarakat dijadikan hanya sekedar obyek pembangunan, ini terlihat dari program-program yang diterapkan di Wukirsari tampak insiatif yang datang dari IRE maupun pemerintah desa yang berkerjasama untuk menjelmakan dirinya seolah-olah itu suguhan untuk rakyat.

Padahal IRE juga tak pernah mempertimbangkan substansi keadaan desa Wukirsari apakah demokratis atau belum. Diterapkan program-program tersebut hanya untuk sekedar memenuhi persetujuan dari pendonor asing yang bermitra bersama IRE. Dari situlah LSM ini dalam melakukan gerakannya menggunakan paradigm reformis. Paradigma ini seperti dijelaskan di muka bahwa masyarakat tidak mengetahui kenapa rakyat harus dimobilisasi. Diterapkannnya program hanya dari insiatif IRE dengan persetujuan pendonor dan kemudian dari program-program tersebut diketahui bahwa hasil dari riset-risetnya tidak pernah dikomunikasikan kepada masyarakat. Hal itulah seperti dikemukakan dimuka rakyat hanya menjadi obyek pembangunan saja.

Selanjutnya peran LSM IRE dalam berhubungan dengan Negara ada kecenderungan condong pada model *Model High Level Politics: Grassroots Mobilization*. Kemudian dilihat dari penggunaan istilah dalam pembangunan politik bahwa LSM ini memiliki kemampuan ganda dan bisa menyesuaikan, menjelma disesuaikan dengan isu yang diangkat dan disesuaikan pula pada aktor-akator pemangku kepentingan. Hal itulah apabila dikaitan dengan pembangunan politik maka perannya di Wukirsari ada lima peran yang dimainkan pertama, sebagai salah satu satu segi proses perubahan sosial; kedua sebagai mobilisasi dan

partisipasi massa; ketiga, pembangunan politik sebagai prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi; keempat, pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan masyarakat industri; lima pembinaan demokrasi

2. Proses pembangunan politik oleh IRE Yogyakarta di desa Wukirsari, Bantul, Yogyakarta.

Proses pembangunan politik oleh IRE Yogyakarta di desa Wukirsari dari beberapa program yang telah disebutkan di atas antara lain, Proses pembangunan politik yang dilakukan oleh IRE Yogyakarta di desa Wukirsari terkait dengan banyak hal jika dihubungkan melalui berbagai aspek pelaksanaan program yang diterapkan di Wukirsari. Hal inilah yang menjadi konsen IRE dalam pembangunan politik, pembangunan politik tak lepas pula dari pembangunan demokrasi. Di mana pembangunan politik mencakup beberapa aspek yang sangat luas tak terkecuali adanya proses pendidikan politik kepada warga di mana dalam ruanglingkup pembangunan politik disebut sebagai salah satu segi upaya peminaan demokrasi. Bila dilihat dari program-program IRE Yogyakarta yang merupakan pembinaan demokrasi atau pendidikan politik *pertama*, program Pengembangan Wacana Demiliterisasi di Tingkat Lokal, di mana dalam program ini proses pendidikan politik dari program pengembangan wacana demiliterisasi di tingkat lokal, ada tiga tahap, pertama kegiatan dialog tahap I dan II dilakukan di tiga dusun, yakni dusun Cengkehan, Manggung dan Karangsem. Dialog di tingkat dusun berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan ulama,

kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh pemuda dan ibu-ibu. Lalu setelah dikumpulkan dari ide-ide ditingkat dusun pada Tahap III disebut konferensi desa di mana diundang juga institusi pemerintahan dan militer, seperti Camat, Kepala Desa, Polsek dan koramil.

Di mana diharapkan oleh IRE untuk mengurangi kekuatan militer di tingkat lokal ketika rezim orba dulu yang dibayangkan oleh IRE di desa Wukirsari masih kuat budaya militerisme yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Padahal diketahui melalui analisis wacana teks di atas tidaklah tepat bahwa IRE dalam melakukan pendidikan politik kepada warga di dasarkan latar belakang yang sesungguhnya terjadi di masyarakat Wukirsari. Hal ini terlihat dari proses dialog warga Wukirsari dengan fasilitator bahwa IRE dalam tataran empirik permasalahan desa yang diungkapkan kepada fasilitator IRE Yogyakarta berbeda dalam tataran konseptual mengenai 'demiliterisasi' itu sendiri yang dipahami oleh masyarakat berbeda dengan fasilitator IRE Yogyakarta. Artinya bahwa secara tidak langsung warga tidak memahami apa yang dinamakan demiliterisasi di tingkat lokal, yang mengarah ketidaktepatan transformasi gagasan, pengendapan demokrasi kepada warga hal ini terlihat bahwa IRE tidak secara tidak langsung menginformasikan kepada warga dengan kalimat militer. Tetapi warga sendiri yang memahami kalimat polisi dan tentara. Padahal yang diusung dalam program ini sesungguhnya bagaimana masyarakat sipil agar tidak terpengaruh, mengurangi gaya-gaya yang dilakukan militer. Di mana warga hanya dijadikan obyek penelitian oleh para ahli apabila dimuka telah disebutkan bahwa tujuan

pendidikan politik di Wukirsari alasannya kurang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa IRE sengaja menerapkannya di Wukirsari bukan karena permasalahan yang substantif tetapi hanya untuk sekedar memenuhi proyek.

Kedua, pada program pengembangan *good governance* di tingkat lokal yang dilangsungkan di Wukirsari dari proses-proses pendidikan politik kepada warga cukup panjang dari yang pertama dilakukan oleh fasilitator IRE di dusun-dusun dari perwakilan masyarakat politik sendiri, masyarakat ekonomi sendiri dan masyarakat sipil sendiri. Dari pelatihan tersebut kemudian dilakukan pendampingan dari fasilitator IRE untuk meyakinkan kembali apakah gagasan-gagasan itu telah mengendap atau belum. Baru kemudian dipertemukan dari ide-ide mereka yaitu disebut dengan kegiatan lokarya desa. Ide-ide dari masyarakat sipil, ekonomi, politik disatukan dalam kegiatan lokarya desa ini dengan begitu akan disatukan gagasan antara ketiga elemen masyarakat tersebut. Lalu kemudian dievaluasi dengan jalan melihat praktek-praktek yang dilakukan pada saat masyarakat desa melalui aktivitas sehari-hari dengan melihat bagaimana prosesnya dalam memenuhi pelayanan di desa. Evaluasi dilakukan setelah adanya kegiatan-kegiatan tersebut dengan dikumpulkan disebut *Forum Group Discussion*(FGD), dan setiap pelatihan langsung di evaluasi ada *fit and propertest*.

Ketiga, kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa, kegiatan riset ini dilakukan di satu kabupaten yang dikumpulkan pelaku-pelaku industri lalu di advokasi dari pemerintah daerah maupun pelaku bukan industri

untuk dilakukan pemetaan dan analisis proses, problem, manfaat dan dampak industrialisasi desa terhadap kehidupan (sosial, ekonomi dan politik) masyarakat desa supaya mendorong agar praktek-praktek industri tersebut juga pikirkan oleh pemerintah supaya terjamin dan ada berkelanjutan. Namun dari upaya-upaya ini hanyalah sekedar wacana industrialisasi yang diupayakan IRE dan hasil akhirnya dari program ini hasil risetnya tidak dikomunikasikan kepada masyarakat maupun pemerintah desa maupun kabupaten sendiri, keberlangsungan program ini sukses diterapkan ketika dalam jangka waktu proyek setelah itu tidak ada terjadi keberlanjutan industrialisasi desa.

Keempat, kegiatan ''*Revitalising Craftwomen of Batik Cottage Industry in Bantul*'', proses dari kegiatan ini pertama, tahap persiapan terdiri dari *need assesement* dan menentukan kegiatan; tahap kedua pelaksanaan yaitu terdiri dari pengorganisasian di mana dimulai dengan melakukan kontak dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan desa sebelum bertemu dengan kelompok sasaran selanjutnya tahap mengumpulkan perajin di tiga dusun sebagai kelompok sasara yaitu dusun Cengkehan, Giriloyo dan Karang Kulon, selanjutnya penguatan kapasitas dan pelatihan terutama dalam kegiatan ini adalah penentuan tema, materi, peserta pelatihan dan kebutuhan selama pelatihan ditentukan melalui diskusi komunitas dan membangun akses; ketiga tahap akhir yaitu monitoring dan evaluasi.

3. Ideologi yang tersembunyi dalam melakukan gerakan LSM IRE di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Ideologi yang digunakan dalam melakukan gerakan LSM IRE Yogyakarta menggunakan ideology developmentalisme dengan paradigma LSM reformis. Ideologi developmentalisme (ideologi pembangunan) yang mula-mula adalah salah satu teori pembangunan. Teori pembangunan dianggap mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh berjuta-juta masyarakat di Dunia Ketiga.

Oleh sebab itu, istilah pembangunan tersebut telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini kebenaran dan keampuhannya oleh masyarakat secara luas. Dengan demikian teori pembangunan dianggap sebagai ideologi yang disebut Developmentalisme. Strategi dan kebijakan dari pendekatan pembangunan ini bahwa industrialisasi yang cepat dan perluasan sektor modern pada umumnya adalah jalan terbaik bagi pembangunan ekonomi yang cepat dan penciptaan lowongan lapangan kerja. Dengan begitu LSM IRE yang menggunakan ideologi developmentalisme dalam program-programnya di desa Wukirsari ada kecenderungan berbau ideologi neo-liberal ditelusuri melalui analisis analisis sisteksis yaitu pada Koherensi Kondisional dan dikuatkan pada analisis konteks diketahui seperti wacana *good governance* cara pandang IRE mengacu pada prespektif World Bank (WB) yang menekankan pentingnya *power and sharing* antara politisi, masyarakat dan pelaku bisnis seperti program *promosi good governance*, riset advokasi tata kelola pembaharuan

industrialisasi desa dan penguatan perekonomian perajin batik di Wukirsari, Bantul. Walaupun ada program sebelumnya seperti penguatan wacana demiliterisme di tingkat lokal memang hal itu arahnya belum berbau neo-liberal hanya saja ideologi LSM dalam hal ini mempunyai kesamaan dalam hal memobilisasi rakyat untuk bertisipasi dalam diskusi-diskusi mengenai isu desa permasalahan diangkat untuk menciptakan kehidupan yang demokratis. Namun tidak mempertanyakan kenapa rakyat harus dimobilisasi. Dan program ini sebagai pancingan awal untuk pengendapan demokrasi yang cenderung liberal melalui gagasan pemikiran dengan isu-isu yang diangkat pada program ini sehingga memungkinkan terbukannya pintu-pintu agenda IRE selanjutnya diterapkan seperti promosi *good governance* dan selanjutnya seperti program-program yang telah disampaikan di muka yang mengarah kepada ideologi neo-liberalisme.

4. Hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan politik oleh IRE Yogyakarta di desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan politik oleh IRE Yogyakarta di desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta antara lain adalah adanya pragmatisme di dalam masyarakat yakni adanya kurang kepercayaan warga terhadap ide-ide IRE Yogyakarta karena adanya kekecawaan warga terhadap IRE sebagai eksekutif tradisi demokrasi warga desa yang berasaskan kekeluargaan, sementara IRE berasaskan Neo-liberal individualis. Hambatan yang lainnya adalah bahwa sistem yang telah lama mengendap di Desa Wukirsari di

mana dengan demokrasi yang bersifat kekeluargaan akan sulit bagi IRE untuk merubah sistem demokrasi yang cenderung sifatnya liberal. Gagasan yang ditularkan kepada warga terkadang tidak sama dipahami oleh masyarakat.

Materi-materi yang telah disusun oleh para ahli yang berlatar belakang gelar Universitasnya dengan gagasan akademiknya dalam mengkomunikasikan kepada warga menjadi hambatan tersendiri. Dengan istilah-istilah yang asing yang diterima oleh telinga warga kurang membumi di mana akan menyebabkan kurang pemahaman bagi warga secara menyeluruh seperti halnya kampanye *good governance*.

Hambatan selanjutnya IRE mengalami kesulitan dalam hal menyakinkan warga untuk terlibat aktif di pemerintahan desa, dikarenakan warga lebih menyerahkan urusan segala urusannya kepada pemerintahan desa hal itu dikarenakan dari program-program yang digalakan IRE untuk masyarakat menganggap bahwa hal itu hanya kepentingan pemerintah desa untuk mengakomodasi melalui tangan IRE supaya warga dapat dimobilisasi padahal setelah berlangsungnya pelatihan-pelatihan seperti kampanye *good governance* masyarakat merasa kurang mengena untuk kepentingan masyarakat yang malah lebih terkesan demi kepentingan pemerintah desa.

Hal itu juga pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakakuntabilisan proses pendidikan politik kepada warga menjadi tumpang tindih, antara teori, konsep yang ditranferkan oleh IRE kepada masyarakat, di mana akan menjadi ketidaksamaan pemahaman dengan begitu, IRE hanya terkesan membubungkan

teori-teori untuk belajar berdemokrasi namun setelah dihadapkan kepada realitas kehidupan warga terasa kurang cocok untuk mengatasi persoalan warga di desanya dan transfer pengetahuanpun kurang berhasil karena pemahaman warga dan IRE berbeda terlihat dari beberapa definisi yang ditularkan kepada warga salah satunya mengenai wacana demiliterisasi pada masyarakat lokal.

## **B. Saran**

1. Program-program IRE lebih efektif sekiranya disosialisasikan melalui media-media lokal yang sudah ada, tidak hanya diskusi yang serba teoritis belaka tetapi juga praktis melalui kesenian-kesenian tradisi adat istiadat masyarakat Wukirsari.
2. IRE juga memunggunakan pengaruh para sesepuh desa dalam konteks membumikan berbagai programnya kepada masyarakat.
3. Walaupun memang tipe LSM IRE ini berjangka proyek dan selama ini IRE masih menjalin komunikasi kepada pemerintah Desa Wukirsari setidaknya hasil-hasil risetnya dapat ditindaklanjuti dari program-program yang belum dituntaskan.
4. IRE semestinya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga seharusnya mampu memberikan kasadaran, dan menstranformasikan pemikiran demokrasi Pancasila yang sesuai dengan masyarakat pedesaan.
5. Sebagai desa wisata, IRE perlu memikirkan ulang bagaimana menjembatani sektor pariwisata dengan pemerintah desa, dan pemerintah di atasnya untuk lebih membuka jaringan luas baik domestic maupun mancanegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan, Gaffar. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfian. 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gremedia.
- Arbi, Sanit. 1981. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Bambang, Hudayana dkk. 2000. *Penguatan Wacana Demilirisasi Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, Bungin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Corten, David C. 2002. *Menuju Abad Ke 21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional edisi keempat. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. 2008. *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamid, Hasan Lubis. 2011. *Analisis Wacana Pragmatik*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Hetifah, SJ Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Juwono, Sudarsono. 1991. *Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ketut, Suwondo. 2005. *Civil Society Di Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Percik.
- Kacung, Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Persada Media Group.
- Larry, Diamond. 2003. *Develompig Democracy toward Consolidation (Terj)*. Yogyakarta: IRE Press Yogyakarta.
- Lisa, Jordan & Peter Van Tuijl. 2009. *Akuntabilitas LSM, Polotik, Prinsip dan Evaluasi*. Jakarta: LP3ES.
- Loekman, Soetrisno. 1991. *Industri Pedesaan dan Masalah Pengembangannya*. Yogyakarta: Universitas Wangsa Manggala
- Mansour, Fakih. 2008. *Masyarakat sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode dam Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mansour, Pateda. 2011. *Linguistik (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Mohtar, Mos' oed. 1994. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemetaan Swadaya. 2009. Tim Perencana Desa 2009-2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 08 tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten No 20 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa

- Pitra, Narendra. 2008. *Metodologi Riset Komunikasi*. Yogyakarta: Balai Pengkajian Informasi Pusat Kajian Media dan Budaya Populer.
- Ramlan, Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Revrison, Baswir. 2009. *Bahaya NeoLiberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusadi, Kantaprawita. 1992. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sahid, Gatara. 2009. *Ilmu Politik dan Menerapkannya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sanapiah, Faisal. 2000. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3 Malang.
- Siti, Zuhro. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesiambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. 2008. Cetakan Keempat. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Dasar Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sotoro Eko: dalam Makalah dibawakan dalam Konferensi Nasional LSM/Organisasi Non Pemerintah, PACT-INPI-CSSP, Hotel Salak, Bogor, 1-4 Agustus 2000.
- Tim ICCE. 2011. *Demokrasi: Hak-hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Tumpal, P Saragi. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*. Jakarta: CV.Cipuru.
- Muhammad, Budiari. 2002. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*. Yogyakarta: E-Law Indonesia.

### **Undang-undang:**

- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Sumber Internet:**

<http://www.ireyogya.org/id/about/pengalaman-2f5c0f.html>) diakases tanggal 26 Meret 2012  
<http://www.ireyogya.org/id/about/visi-dan-misi.html> diakases tanggal 26 Meret 2012

<http://www.ireyogya.org/id/about/profil-ire.html> diakases tanggal 26 Meret 2012

John A. Halloran, Sumerian Lexicon Version 3.0. Diambil dari situs <http://www.sumerian.org/sumerian.pdf>.

Van Dijk, Teun A. 1982. *Newa Schemata*. University of Amsterdam. Diambil dari situs <http://www.discourses.org/OldArticles/News%20Schemata.pdf>.

Van Dijk, Teun A 1977. *Semantic Macro-Structures and Knowledge Frames in Discourse Comprehension*. University of Amsterdam. Diambil dari situs <http://www.discourses.org/OldArticles/Semantic%20MacroStructures%20and%20Knowledge%20Frames%20in%20Discourse.pdf>.

**Sumber lain:**

Boklet Profil Organisasi IRE Yogyakarta